

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN**

**(Studi Kasus Nelayan Tangkap Di Desa Paku, Kecamatan
Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat)**

Disusun dan diajukan oleh

**INA MAISARA
L041201074**



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**PERAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN**

**(Studi Kasus Nelayan Tangkap Di Desa Paku, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat)**

INA MAISARA

L041 20 01074

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN**

**(Studi Kasus Nelayan Tangkap di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten
Polewali Mandar, Sulawesi Barat)**

Disusun dan diajukan oleh:

INA MAISARA

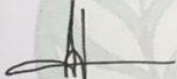
L041 20 1074

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas
Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin Pada Tanggal Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat.

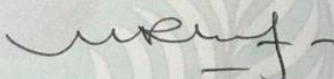
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota


Dr. Amiluddin, S.P., M.Si

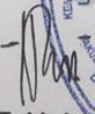
NIP. 19681220 200312 1 001


Prof. Dr. Ir. Mardiana E. Fachry, M.S.

NIP. 19590707 198503 2 002

Mengetahui

Ketua Program Studi Agrobisnis Perikanan


Dr. Sitti Fakhriyah, S.Pi, M.Si

NIP. 19720926 200604 2 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Maisara
NIM : L041 20 1074
Program Studi : Agrobisnis Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Tangkap di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat)" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai kebutuhan peraturan perundang – undangan (Permendiknas No. 17 Tahun 2007).

Makassar, 27 Mei 2024

Penulis



Ina Maisara
L041 20 1074

PERNYATAAN AUTORSHIP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Maisara

NIM : L041 20 1074

Program Studi : Agrobisnis Perikanan

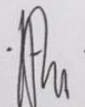
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi pada jurnal atau form ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang – kurangnya dua semester (sejak pengesahan Skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah satu seorang dari penulis berhak mempublikasinya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

Makassar, Mei 2024

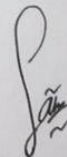
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Agrobisnis Perikanan



Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi., M.Si
NIP. 1972926 200604 2 001

Penulis



Ina Maisara
L041 20 1074

ABSTRAK

Ina Maisara L041 20 1074. “Peran Pemerintah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Tangkap Di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat)”. Dibimbing oleh Amiluddin sebagai Pembimbing Utama dan Mardiana Ethrawaty. Fachry sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa program pemerintah terhadap pemberdayaan, respon masyarakat nelayan terhadap program pemerintah, dan peran pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023 – Januari 2024 pada kelompok nelayan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dan Dinas Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode penentuan informan yaitu purposive. Teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teori Miles and Huberman. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemerintah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar meliputi penyuluhan dan pendanaan/permodalan, termasuk bantuan mesin 15 PK, fish finder, GPS, dan coolbox. Masyarakat nelayan mendukung program ini karena berdampak positif pada kesejahteraan mereka, terlihat dari peningkatan pendapatan dan pengurangan pengeluaran modal. Pemerintah berperan optimal sebagai fasilitator, namun peran sebagai regulator dan dinamisator perlu ditingkatkan.

Kata kunci : peran, pemerintah, pemberdayaan, program, kelompok, nelayan.

ABSTRACT

Ina Maisara L041 20 1074. "The Role of Government Through Fishermen Community Empowerment Programs (Case Study of Capture Fishermen in Paku Village, Binuang Sub-district, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi)." Supervised by Amiluddin as Main Advisor and Mardiana Ethrawaty Fachry as Co-advisor.

This research aims to understand the government programs for empowerment, the fishermen community's response to these programs, and the government's role in empowering the fishermen community in Paku Village, Binuang Sub-district, Polewali Mandar Regency. The research was conducted from December 2023 to January 2024 with the fishermen groups in Paku Village, Binuang Sub-district, Polewali Mandar Regency, and the Department of Marine and Fisheries of Polewali Mandar. The research is descriptive qualitative using purposive sampling for informant selection. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, with data analysis using Miles and Huberman's theory. The results show that the government programs in Paku Village, Binuang Sub-district, Polewali Mandar Regency include counseling and funding/capital assistance, such as providing 15 PK engines, fish finders, GPS, and coolboxes. The fishermen community supports these programs because they positively impact their welfare, as evidenced by increased income and reduced capital expenditure. The government plays an optimal role as a facilitator, though its roles as a regulator and dynamizer need improvement.

Keywords: role, government, empowerment, program, group, fishermen.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* pemilik dunia dan seisinya dengan segala kesempurnaan, yang telah memberikan penulis kesabaran, ketenangan, dan karunia selama proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa pula penulis mengirimkan sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang seperti sekarang.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai “**Peran Pemerintah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Tangkap Di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat)**”, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Agrobisnis Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada :

1. Kepada orangtua tercinta **Ayahanda Muhammad Nur** dan **Ibunda Lestari**, terima kasih telah menjadi orangtua yang membimbing, memberikan dukungan, tidak pernah Lelah untuk memanjatkan ribuan do'a yang terbaik untuk penulis, dan telah memberikan kasih sayang yang tidak ada habisnya serta menjadi sumber semangat penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Safruddin, S.Pi., M.Si., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan.
3. **Dr. Fahrul, S.Pi., M.Si.** selaku Ketua Departemen Perikanan.
4. **Dr. Sitti Fakhriyyah, S.Pi., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Agrobisnis Perikanan.
5. **Bapak Dr. Amiluddin, S.P., M.Si.** selaku pembimbing ketua sekaligus dosen penasehat akademik dan juga **Ibu Prof. Dr. Ir. Mardiana Ethrawaty Fachry, M.S.** selaku pembimbing kedua, yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Dr. Firman, S.Pi., M.Si** dan **Bapak Dalvi Mustafa, S.Pi., M.Sc.** selaku penguji yang telah memberikan pengetahuan baru dan masukan saran dan kritik yang sangat membangun.

7. **Seluruh Staf Dosen Departemen Perikanan** yakni Bapak dan Ibu yang telah mendidik penulis dalam menempuh Pendidikan di Departemen Perikanan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
8. **Seluruh Staf karyawan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan dan Staf Kepustakaan** yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
9. **Seluruh Informan** yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis untuk memberikan informasi serta data-data sampai proses penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan limpahan rasa bangga melalui skripsi ini penulis sampaikan kepada mereka yang sangat berperan dalam proses penelitian, penulisan, hingga penyelesaian skripsi ini.

1. **Rasyika Binti Darwis**, yang setia kebersamai penulis dimasa akhir perkuliahan, penyusunan skripsi, bimbingan revisi dan kepengurusan berkas serta sabar menghadapi penulis yang sering kali berkeluh kesah namun tetap memberikan masukan positif kepada sang penulis dan selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga bisa sampai dititik ini.
2. **Mila Amelia Putri**, teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis dari sejak menjadi mahasiswa baru di kampus Universitas Hasanuddin dan selalu setia menemani tiap suka dan duka.
3. Kakanda **Andy Hidayat Muliando**, senior yang selalu membantu penulis disaat penulis kebingungan dalam penulisan skripsi.
4. Sepupu **Anugrah Sabita Sahwa, Nur Ain Natasya, Putri Mila Syazwani dan Nabilah** yang telah setia menemani penulis pada saat penelitian serta menghibur penulis jika penulis merasa bosan, sedih, dan tertekan.
5. Teman seperjuangan dari bangku Sekolah Menengah Atas **Nurul Annisya dan Sri Wahyuni Borahima**, yang selalu ada dikala susah setia mendengarkan cerita, keluh kesah dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis serta setia menghibur dan menemani disaat peneliti ingin menenangkan pikiran.
6. Sahabat-sahabat perkuliahan **Mila Amelia Putri, Ayu Azhari, Rasyika Binti Darwis, Nuralimatul Izzah, Adellah Masnur dan Nursakina** yang telah bersama-sama melewati suka dan duka selama kuliah, dan selalu bisa diandalkan
7. Seluruh teman-teman **E20ULIS (Angkatan 2020 Agrobisnis Perikanan)** atas dukungan dan solidaritasnya selama penulis menjalankan masa studi.
8. Himpunan tercinta, kakanda dan teman-teman **HIMASEI UNHAS** yang telah mewarnai dan memberikan pengalaman, pengetahuan penulis dimasa perkuliahan.

9. Teman-teman **KKNT Posko Sidorejo Gel. 110** atas pembelajaran, pengalaman, dan semua cerita seru selama proses pengabdian.
10. **Pemerintah daerah** khususnya para **Staf Kantor Desa Paku** dan **Dinas Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar** yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
11. **Seluruh pihak** yang berperan selama perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha keras, berjuang sejauh ini, dan mengatasi rasa sedih serta kebingungan yang seringkali datang, sehingga penulis mampu dan lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP



Ina Maisara lahir di Paku pada tanggal 25 Januari 2002. Penulis merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara, memiliki adik bernama Muhammad Saifullah. Penulis adalah anak dari pasangan ayah Muhammad Nur dan ibu Lestari. Penulis menempuh pendidikan dimulai pada tahun 2007 di Tadika KEMAS Kampung Bukit Lanchung. Pada tahun 2008 penulis kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan di SDN 010 Paku, namun pada tahun yang sama, penulis kembali pindah ke Malaysia dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pandamaran Jaya, Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan. Pada tahun 2012, penulis kembali lagi ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan kembali di SDN 010 Paku dan lulus di tahun 2014. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 7 Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2017. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin Program Studi Agrobisnis Perikanan melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa kegiatan di kampus. Seperti, berperan sebagai sterring komite Musyawarah Besar XVII KMP ABP KEMAPI FIKP UNHAS, dan pernah berperan sebagai panitia di beberapa kegiatan organisasi kampus. Disamping itu, penulis juga aktif di bidang akademik sebagai asisten praktik lapang.

Penulis melaksanakan KKN Tematik Kesehatan Ibu dan Anak Sulawesi Barat Gelombang 110 tahun 2023 di Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai tugas akhir, penulis melakukan penelitian yang berjudul "Peran Pemerintah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Nelayan Tangkap di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat)".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERNYATAAN AUTORSHIP	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Peran Pemerintah	4
B. Pemberdayaan Masyarakat	6
C. Masyarakat Pesisir	7
D. Nelayan	8
E. Kelompok Nelayan	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Kerangka Pikir Penelitian	13
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	15
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	15
B. Jenis Penelitian	15
C. Informan dan <i>Key Informant</i>	15
D. Sumber Data	16
E. Teknik Pengambilan Data.....	16
F. Teknik Analisis Data.....	17
G. Definisi Operasional.....	18
IV. HASIL PENELITIAN	19
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
B. Sarana dan Prasarana di Desa Paku.....	21

C. Karakteristik Informan	22
D. Struktur Organisasi Pembagian Tugas Kelompok Nelayan di Desa Paku	24
E. Peran Pemerintah untuk Kelompok Nelayan di Desa Paku	25
F. Respon Kelompok Nelayan Terhadap Program Pemerintah di Desa Paku.....	32
G. Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Paku	37
V. PEMBAHASAN.....	40
A. Program Pemerintah	40
B. Respon Masyarakat Nelayan di Desa Paku Terhadap Program Pemerintah.....	45
C. Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Paku	48
VI. KESIMPULAN.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Peneltian.....	14
Gambar 2. Struktur Organisasi Kelompok Nelayan di Desa Paku (Informasi dari Ketua Kelompok Nelayan Culliry).....	24
Gambar 3. Diagram respon terhadap program khusus.....	33
Gambar 4. Diagram respon terhadap program pemerintah yang tepat sasaran.....	34
Gambar 5. Diagram respon terhadap manfaat bantuan.....	34
Gambar 6. Diagram respon terhadap administrasi yang baik.....	35
Gambar 7. Diagram respon terhadap pemerataan program bantuan.....	36
Gambar 8. Diagram respon terhadap program yang bermanfaat.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2. Jumlah Informan dan <i>Key Informant</i> penelitian.....	16
Tabel 3. Jumlah penduduk di Desa Paku.....	20
Tabel 4. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Paku.....	20
Tabel 5. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Paku.....	21
Tabel 6. Sarana dan prasarana di Desa Paku.....	22
Tabel 7. Karakteristik informan berdasarkan tingkat umur di Desa Paku.....	23
Tabel 8. Karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Paku.....	23
Tabel 9. Matriks peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan nelayan di Desa Paku.....	26
Tabel 10. Matriks Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator dalam Pemberdayaan Nelayan di Desa Paku	27
Tabel 11. Matriks Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Nelayan di Desa Paku.....	29
Tabel 12. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok nelayan di Desa Paku pada tahun 2022.....	32
Tabel 13. Respon terhadap program khusus.....	32
Tabel 14. Respon terhadap program pemerintah yang tepat sasaran.....	33
Tabel 15. Respon terhadap manfaat program pemerintah.....	34
Tabel 16. Respon terhadap administrasi yang baik.....	35
Tabel 17. Respon terhadap pemerataan program bantuan.....	35
Tabel 18. Respon terhadap program sudah memberikan manfaat.....	36
Tabel 19. Peran pemerintah sebagai regulator di Desa Paku.....	37
Tabel 20. Peran pemerintah sebagai dinamisator di Desa Paku.....	38
Tabel 21. Peran pemerintah sebagai fasilitator di Desa Paku.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian.....	55
Lampiran 2. Tabel Data Kuesioner Tabulasi.....	56
Lampiran 3. Kuesioner.....	57
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	60

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu negara yang memiliki wilayah maritim dan kepulauan yang sangat besar adalah Indonesia, yang terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil. Wilayah perairannya mencakup luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar 63 persen dari total wilayah Indonesia, yang sebanding dengan tiga perempat dari keseluruhan wilayah negara ini. Indonesia juga memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia setelah Kanada. Wilayah perairan ini, termasuk lautnya, memiliki potensi produksi ikan laut yang sangat besar dan berkelanjutan, dengan perkiraan sekitar 6,51 juta ton per tahun atau sekitar 8,2% dari total potensi produksi ikan laut global. Dari informasi ini, terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi kekayaan yang besar dalam sektor perikanan dan kelautan (Kaswandi, 2017).

Pemerintah adalah elemen kunci dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Tanggung jawab yang juga sekaligus menjadi misi negara Indonesia, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan semua keturunan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan pendidikan bagi seluruh warga negara, serta mewujudkan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia (Rahmalia, 2023).

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa: "Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Oleh karena itu, Pemerintah pada Desa Paku, Kabupaten Polewali Mandar memiliki program pemberdayaan pada nelayan, Dimana nelayan diberi kewenangan untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebutuhan penunjang dalam meningkatkan hasil tangkapan melalui proposal yang nantinya akan disampaikan kepada yang berwenang dan akan ditindak lanjuti sebagai mana prosedur yang telah di tetapkan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk merangkul masyarakat nelayan agar dapat merangkum aspirasi meningkatkan kemampuan ekonomi, sumberdaya manusia, pemberdayaan, penyediaan infrastruktur, dan pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkhusus pada bidang perikanan dari masyarakat nelayan yang ada di Desa Paku, Kabupaten Polewali Mandar.

Contoh penelitian yang menunjukkan peran program pemberdayaan nelayan adalah Windasai, *et al.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Masyarakat nelayan yaitu menyelenggarakan program pemberdayaan Masyarakat nelayan seperti peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana serta pembentukan kelembagaan nelayan. Namun di masyarakat masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, keterbatasan anggaran, kurangnya teknologi dan transportasi yang memadai. Hal ini menyebabkan pemberdayaan Masyarakat nelayan kurang optimal.

Peran pemerintah masing-masing diharapkan berjalan sesuai tupoksinya, seperti pemerintah sebagai regulator memiliki peran untuk memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan, Pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah harus dapat menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada Masyarakat, dan Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan. (Sapriadi, 2018)

Secara geografis desa Paku terletak di kecamatan Binuang, kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Desa Paku terdiri dari 5 dusun yaitu Pasubbe, Dongi, Paku, Tete, dan Laba-laba. Dimana dari kelima dusun tersebut terdapat 2 kelompok nelayan yang terletak pada dusun tete. Dusun Tete berada di wilayah pesisir. Adapun jenis nelayan terbagi menjadi dua yaitu nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Namun, nelayan yang tergabung dalam anggota kelompok nelayan hanya terdiri dari jenis nelayan tangkap. (Data Sekunder, 2023). Kelompok nelayan ini, telah menerima bantuan dari pemerintah setempat (Dinas Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar, 2023).

Berdasarkan deskripsi yang diuraikan merupakan data pada masyarakat nelayan di Desa Paku. Dengan demikian, penelitian dilakukan tentang bagaimana peran pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat nelayan, selain daripada itu peneliti juga ingin mengetahui apakah dalam melakukan program pemberdayaan tersebut ada perubahan yang dirasakan oleh masyarakat nelayan dalam konteks ini ialah kelompok nelayan yang ada di Desa Paku. Atas dasar latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Peran pemerintah melalui**

program pemberdayaan Masyarakat nelayan (Studi kasus nelayan tangkap di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas untuk memberikan batasan dan pedoman arah penelitian maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja program pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana respon masyarakat nelayan terhadap program yang di berikan oleh pemerintah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar ?
3. Bagaimana peran pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui program pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat nelayan terhadap program yang diberikan oleh pemerintah di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dalam meningkatkan peran pemerintah di Desa Paku, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sehingga menghasilkan solusi kepada semua pihak yng terkait khususnya pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah

Menurut Imanuel dalam (Ramdayanti *et al* 2021). Peran adalah elemen yang mengubah kedudukan (status) seseorang. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan posisinya, itu berarti mereka sedang menjalankan suatu peran. Pada dasarnya, peran juga dapat dijelaskan sebagai serangkaian perilaku yang timbul akibat jabatan tertentu yang dipegang oleh seseorang. Peran juga bisa diartikan sebagai kumpulan tuntutan yang bersifat struktural, seperti norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan sebagainya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merujuk kepada serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu dalam masyarakat, dan dalam konteks kata "peranan," ini mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, peranan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami perilaku yang terstruktur dan relatif independen dari individu tertentu yang secara kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tuntutan peran yang diemban. Selain itu, peran juga dapat didefinisikan sebagai aspek yang berubah-ubah dari posisi atau status seseorang, terjadi ketika individu tersebut memenuhi hak dan kewajiban yang sesuai dengan posisinya. Ini menunjukkan bahwa peran dianggap telah terlaksana jika seseorang dengan status tertentu telah memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pemerintah merupakan elemen penting dalam suatu negara yang memegang peranan sentral dan tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Sebagai regulator, pemerintah memegang peran penting dalam memberikan panduan dasar kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur segala kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan. Oleh karena itu, pentingnya pemberdayaan masyarakat sangat ditekankan untuk menciptakan kesejahteraan yang optimal dan merata di seluruh komunitas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip ini berdasarkan prinsip otonomi sejauh mungkin dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Windasai *et al* 2021).

Pemerintah, dalam definisinya, merujuk pada pengarahan dan administrasi yang sah terhadap urusan warga dalam suatu negara, kota, atau wilayah lainnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, pemerintah dapat dijelaskan sebagai lembaga yang mengatur tata kelola suatu negara, negara bagian, kota, dan sebagainya (Sapriadi, 2018).

Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan di sektor perikanan adalah sangat penting, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pelaksanaan fungsi pemerintahan yang mencakup pemberdayaan. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban berkelanjutan untuk upaya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Hal ini akan memberi mereka kemampuan untuk hidup secara mandiri dan menjadi mandiri tanpa bergantung pada intervensi pemerintah.

Implementasi program pemberdayaan adalah suatu kebutuhan esensial yang memerlukan kerja sama antara beberapa pihak, yakni Pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat. Kolaborasi yang harmonis, seimbang, dan saling menguntungkan akan mendukung keberlanjutan dan keberhasilan program pembangunan yang bertujuan mencapai kemakmuran. Pada bulan Juli 2022, masyarakat berhasil mengimplementasikan rencana pengembangan masyarakat dengan kerja sama yang melibatkan berbagai pihak. Pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Pada upaya membangun masyarakat yang optimal, pemerintah memegang peran penting, antara lain (Sonia & Susilawati, 2022) :

1. Pemerintah sebagai regulator, bertugas mengatur arah pelaksanaan pembangunan yang seimbang melalui regulasi. Sebagai regulator, pemerintah memberikan pedoman dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengawasi semua kegiatan pelaksanaan yang memungkinkan.
2. Pemerintah sebagai dinamisator, menggerakkan partisipasi masyarakat ketika menghadapi kendala dalam proses pembangunan, dengan tujuan untuk mendukung dan menjaga momentum pembangunan daerah. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan bimbingan yang mendalam dan efektif kepada masyarakat, seringkali melalui tim penyuluh atau melalui pelatihan yang diberikan oleh lembaga khusus.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang memperlancar pelaksanaan pembangunan dan menjembatani kepentingan

semua pihak dalam masyarakat agar dapat mengoptimalkan pembangunan daerah.

4. Sebagai fasilitator, pemerintah melakukan pembinaan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan dengan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat terkait.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan elemen esensial dari pendekatan pembangunan yang memusatkan perhatiannya pada semua aspek utama kehidupan manusia dalam lingkungannya, mulai dari dimensi intelektual (Sumber Daya Manusia), dimensi material dan fisik, hingga dimensi manajerial. Menurut Suharto (2017), tujuan utama pemberdayaan adalah 'menguatkan kekuatan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan memiliki keterbatasan, baik karena faktor internal seperti persepsi mereka sendiri, maupun karena faktor eksternal seperti penindasan dalam struktur sosial yang tidak adil'.

Pemberdayaan masyarakat di Indonesia telah menjadi sebuah inisiatif yang diterapkan secara nasional oleh pemerintah dan sektor swasta. Pemberdayaan masyarakat adalah langkah yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketertinggalan. Pendekatan inti dalam konsep pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya pembangunan, bukan hanya sebagai penerima bantuan program (dalam bentuk charity). Dalam konteks ini, masyarakat bukanlah objek dari berbagai proyek pembangunan, melainkan aktor utama yang terlibat dalam upaya pembangunan itu sendiri. (Iswari *et al.*, 2019)

Pemberdayaan adalah suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan mencakup serangkaian langkah untuk memperkuat kekuatan individu atau kelompok yang rentan dalam masyarakat, termasuk orang-orang yang menghadapi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, pemberdayaan bergerak menuju hasil yang diinginkan melalui perubahan sosial, yaitu masyarakat yang mampu mengendalikan kehidupannya dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Ini mencakup kepercayaan diri, kemampuan untuk menyampaikan aspirasi, mencari mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjadi mandiri dalam menjalankan berbagai tugas dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk memberikan masyarakat kekuatan dan wewenang dengan memberikan mereka kewenangan dan kekuasaan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses yang sengaja berfokus pada masyarakat lokal, melibatkan saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, serta

partisipasi kelompok yang menghadapi hambatan sumber daya dalam upaya mendapatkan kontrol lebih besar atas sumber daya tersebut. Pemberdayaan bertujuan membantu klien untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dengan mengurangi dampak dari hambatan sosial dan personal yang mungkin mereka hadapi, sambil meningkatkan kapasitas dan rasa percaya diri mereka untuk memanfaatkan kekuatan mereka, serta mengalihkan kekuasaan dari lingkungan kepada klien. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu terkait dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan (Windasai *et al.*, 2021).

Program pemberdayaan masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan hidup bagi komunitas yang tinggal di wilayah pesisir. Berikut adalah beberapa contoh program pemberdayaan masyarakat pesisir :

1. Pemberian hibah dalam bentuk barang yang diberikan kepada masyarakat nelayan yaitu berupa alat tangkap yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut seperti mesin dan juga beberapa alat yang dibutuhkan sewaktu melakukan proses penangkapan ikan di laut. (Simanullang dan Eriyanti, 2019)
2. Pemberian bantuan modal, dimana diharapkan untuk para nelayan bisa mengembangkan usaha yang mereka lakukan. (Watung *et al.*, 2020)
3. Penyuluhan yang berupa penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah dan pengembangan usaha nelayan serta pendampingan yang dilakukan pada bantuan dari dinas perikanan ke kelompok nelayan (Rahmalia, 2023)

C. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah kelompok individu yang tinggal di wilayah pesisir dan mata pencaharian ekonominya secara langsung tergantung pada penggunaan sumber daya laut dan pesisir. Definisi ini dapat diperluas karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumber daya laut. Mereka mencakup berbagai kelompok, seperti pemilik nelayan, pekerja nelayan, budidaya ikan, pedagang ikan, pengolah ikan, serta penyedia berbagai fasilitas dan alat produksi perikanan. Di luar sektor perikanan, masyarakat pesisir juga dapat mencakup penyedia jasa pariwisata, penyedia jasa transportasi, dan kelompok lain yang menggunakan sumber daya non-hayati di laut dan pesisir untuk mendukung kehidupan mereka (Monintja dan Yusfiandayani, 2018).

Masyarakat di daerah pesisir biasanya memiliki kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan yang menangkap ikan di laut, sementara istri mereka menjalankan

peran sebagai ibu rumah tangga. Keadaan ekonomi masyarakat pesisir cenderung berada dalam tingkat rendah secara relatif (Butarbutar *et al.*, 2020).

Sebagian besar masyarakat pesisir telah mengadopsi keragaman dalam kehidupan mereka, namun tetap mempertahankan semangat kebersamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa komposisi sosial masyarakat pesisir biasanya mencerminkan perpaduan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan. Karena struktur masyarakat pesisir bersifat sangat pluralistik, ini memungkinkan terbentuknya sistem sosial dan nilai budaya yang merupakan hasil dari akulturasi budaya dari setiap komponen yang berkontribusi dalam membentuk struktur masyarakatnya.

Hal menarik adalah bahwa bagi masyarakat pesisir, tinggal didekat pantai merupakan pilihan yang sangat diinginkan karena mereka dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas harian mereka. Dua contoh sederhana dari fasilitas-fasilitas ini adalah: Pertama, akses yang lebih mudah ke mata pencaharian, karena sebagian besar masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya laut, seperti menangkap ikan, mengumpulkan atau mengelola rumput laut, dan sejenisnya. Kedua, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus), dimana mereka bisa dengan cepat membersihkan diri, mencuci pakaian, peralatan rumah tangga, serta mengatasi kebutuhan buang air (baik besar maupun kecil). Di samping itu, mereka juga dapat dengan mudah membuang limbah domestiknya langsung ke pantai atau laut.

Masyarakat pesisir memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang unik dan khas, yang sangat terkait dengan sifat usaha di sektor perikanan. Hal ini dikarenakan karakteristik usaha perikanan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, musim, dan pasar, sehingga karakteristik masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut (Wahyudin, 2003).

D. Nelayan

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah kelompok masyarakat yang menghuni, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir, yang merupakan daerah peralihan antara daratan dan laut. Sebagai suatu entitas sosial, masyarakat nelayan terdiri dari berbagai kategori sosial yang membentuk kerangka sosial mereka. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol budaya yang menjadi pedoman untuk perilaku sehari-hari mereka. Faktor budaya ini membedakan masyarakat nelayan dari kelompok masyarakat lain. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengandalkan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Mereka menjadi kontributor utama dalam pembentukan masyarakat maritim Indonesia.

Secara umum, definisi nelayan merujuk pada individu yang mencari nafkah dengan menjalankan aktivitas menangkap ikan, yakni kegiatan menangkap ikan di perairan laut. Dalam Undang-Undang Perikanan, terdapat dua definisi yang membedakan jenis nelayan, yaitu nelayan dan nelayan kecil. Menurut Pasal 1 angka 10, nelayan adalah seseorang yang mencari nafkah dengan menangkap ikan. Sementara pada Pasal 1 angka 11, nelayan kecil didefinisikan sebagai seseorang yang mengejar mata pencahariannya dengan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menggunakan kapal perikanan yang berukuran paling besar 5 Gross Ton (GT) (Retnowati, 2011)

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang hidupnya sangat bergantung pada hasil laut, entah melalui kegiatan menangkap ikan atau budidaya. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir, di lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan lokasi kerja mereka (Wibisono *et al.*, 2021).

Sastra (2012: 42) menjelaskan bahwa komunitas nelayan adalah kelompok individu yang mencari nafkah dari sumber daya laut dan mendiami desa-desa di pesisir pantai. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.06/MEN/2011, nelayan didefinisikan dengan lebih sederhana sebagai individu yang mencari nafkah dengan menangkap ikan. Menurut Dahuri (2010: 9), nelayan digolongkan sebagai mereka yang bekerja dengan cara mengejar ikan di laut.

Berdasarkan klasifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011: 19) yang mempertimbangkan waktu yang digunakan dalam pekerjaan penangkapan ikan, nelayan dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Nelayan penuh, yang merupakan nelayan yang menghabiskan seluruh waktu kerja mereka untuk menangkap ikan atau hewan air lainnya, atau melakukan usaha di bidang perikanan atau akuakultur.
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerja mereka digunakan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan atau hewan air lainnya.

Nelayan sering dikaitkan dengan keterbatasan dalam hal aset, modal yang terbatas, posisi tawar yang lemah, dan keterbatasan akses ke pasar. Penting untuk dicatat bahwa nelayan tidak membentuk suatu entitas tunggal, melainkan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan kepemilikan alat tangkap (Kaswandi, 2017).

1. Nelayan buruh adalah nelayan yang melakukan pekerjaan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dimiliki oleh orang lain
2. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap, tetapi alat tersebut dioperasikan oleh orang lain.

3. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan tidak melibatkan orang lain dalam pengoperasian alat tangkap mereka.

E. Kelompok Nelayan

Kelompok memiliki ciri diantaranya terdiri dari dua orang atau lebih, terdapat interaksi diantara anggotanya, memiliki tujuan, dan merupakan satu kesatuan, yang berarti memiliki struktur serta pola hubungan diantara anggotanya dalam mencapai tujuan. Terbentuknya kelompok, baik formal maupun informal dilatari oleh berbagai alasan, diantaranya kebutuhan, kedekatan (*proximity*), ketertarikan, tujuan, dan ekonomi (Hariadi, 2011). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terbentuknya kelompok nelayan didorong oleh kesamaan latar belakang sosial-ekonomi sebagai nelayan.

Secara sosiologis, masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang khas dibanding masyarakat agraris dilihat dari karakteristik sumberdaya yang dihadapi. Laut cenderung memiliki sifat yang tidak terkontrol, sehingga pengelolaannya banyak menuai risiko ketidakpastian. (Satria, 2015) Dengan demikian, kelompok nelayan adalah manifestasi dari kesadaran kolektif tentang identitas komunitas yang tergantung dari kegiatan ekonomi perikanan tangkap di wilayah tersebut. Secara sederhana kelompok nelayan adalah beberapa orang nelayan yang menghimpun diri dalam suatu kelompok saling bekerja sama secara teratur karena memiliki keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), keakraban, kepentingan bersama, dan saling percaya, serta mempunyai tujuan bersama.

Pada satu kelompok nelayan, sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat. Kelompok nelayan terbagi dalam empat kelompok yaitu (Ikhwanul, 2014):

- a. Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.
- c. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga
- d. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar

F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yang akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang akan penulis lakukan nantinya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

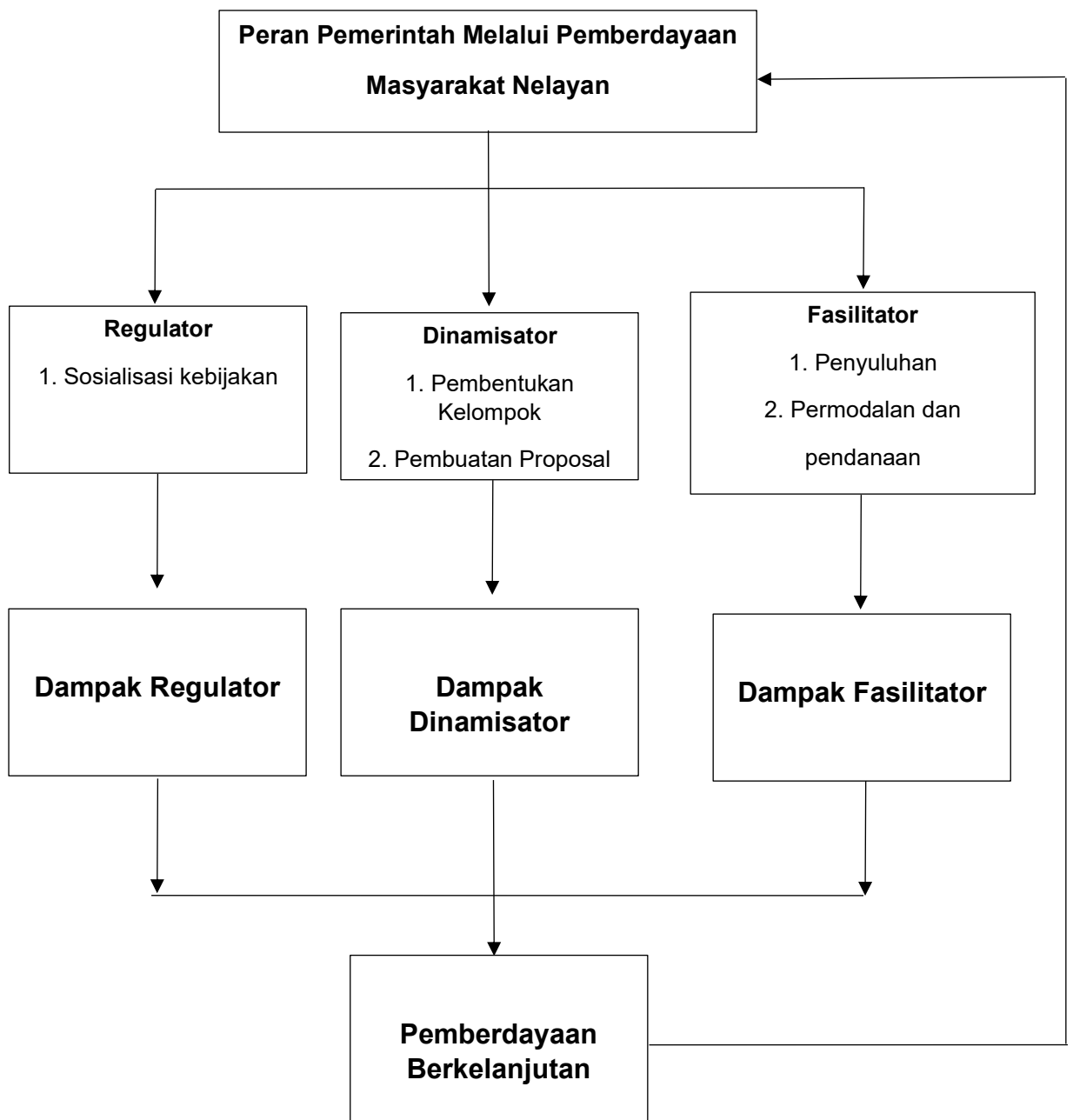
No	Peneliti	Judul	Metode dan Analisis	Hasil
1	Annisa Dwi Rahmalia (2023)	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis melalui Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi secara langsung ke lapangan.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros memiliki peran ganda dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Mereka berperan sebagai regulator dengan mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta menyosialisasikan regulasi yang sesuai dengan pedoman Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Dinas Perikanan bertindak sebagai dinamisor dengan mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan membentuk serta membimbing kelompok nelayan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Terakhir, Dinas Perikanan berperan sebagai fasilitator dengan memberikan penyuluhan, informasi, pendampingan, dan bantuan peralatan tangkap guna meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan.
2	Kaswandi (2017)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar telah berusaha menerapkan pemberdayaan nelayan

	Kabupaten Takalar	deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Arsip.	berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kelangsungan dan fokus proyek. Peran pemerintah mencakup pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, kemitraan usaha, dan pemfasilitas akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk nelayan. Kendala mencakup penyesuaian waktu, akses ke pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan usaha yang lemah. Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan nelayan termasuk sumber daya manusia, kebijakan, modal, sarana, kapasitas sumber daya manusia, anggaran terbatas, regulasi yang terbatas, dan ketergantungan pada pemilik modal.	
3	Sapriadi (2018)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Beba Kabupaten Takalar	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi dengan menggunakan sumberdata seperti responden dan dokumen.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar telah melakukan upaya pemberdayaan nelayan dengan mengacu pada UU No. 7 Tahun 2016. Peran pemerintah termasuk memberikan pelatihan dan pendampingan, khususnya melalui BIMTEK dan penyuluhan di Desa Tamasaju. Namun, kendala dalam penyelarasan waktu berdampak pada partisipasi nelayan dalam kegiatan pemberdayaan.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Kerangka yang digunakan untuk mendukung dan memandu penelitian untuk mengeksplorasi alur skema pemikiran penulis untuk memberikan gambaran tentang struktur pemikiran berbasis penelitian yang membahas masalah utama.

Pemerintah merupakan elemen penting dalam suatu negara yang memegang peranan sentral dan tanggung jawab utama dalam mengelola pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator, dalam mencapai pemberdayaan berkelanjutan. Maka dari itu penelitian ini memiliki kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian